



Minta Pemkot Kejar Target Pajak

PONTIANAK - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mengatakan, poin menohok dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD tahun depan, fokus pada peningkatan pajak. Agar target dapat tercapai, ia ingin perombakan SDM di dalam tubuh Badan Keuangan Daerah Pontianak.

"Hari ini (kemarin) kembali dilanjutkan rapat paripurna membahas raperda APBD Pontianak di tahun 2023. Fokusnya mendengar pandangan fraksi," ungkap Satarudin.

Dari catatan Satar, rerata per-

wakilan fraksi meminta Pemkot Pontianak mengejar pendapatan pajak yang dipandang masih jauh dari target yang sudah ditentukan.

Tidak tercapainya target pajak dimungkinkan banyak penyebabnya. Bisa dari SDM yang malas-malasan mengejar target pajak. Atau ada persoalan lain. "Pegawai BKD jangan maunya dapat insentif banyak. Namun target pajak justru tak tercapai," ungkapnya.

Agar kinerja BKD maksimal, Satar minta Wali Kota dapat merombak habis utamanya di Bi-

dang Pendapatan. Kemudian soal pemisahan BKD dan Dispenda dipintanya harus cepat ditindaklanjuti. Tujuan pemisahan BKD dan Dispenda agar dalam mengejar target pendapatan pajak bisa lebih maksimal.

"Pada intinya hampir sebagian besar fraksi mempunyai pandangan yang sama yakni memprioritaskan untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih maksimal," ujar Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Minta Pemkot Kejar Target Pajak

Sambungan dari halaman 9

Persoalan PAD, sejauh ini pihaknya memang terus menggenjot dengan melakukan berbagai upaya agar PAD ini mencapai target. Meskipun persoalan yang dihadapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kendati demikian, pihaknya

akan tetap berupaya semaksimal mungkin bagaimana meningkatkan PAD ini agar mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk meneggenjotnya, dilakukan intensifikasi dan eksetensifikasi PAD.

"Ekstensifikasi pajak dilakukan dengan target peningkatan jumlah

wajib pajak, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang sudah terdata atau terdaftar," ungkapnya.

Beberapa saran dan masukan dari DPRD Kota Pontianak akan menjadi bahan pertimbangan sebagai dasar evaluasi. Mes-

ki pihaknya juga melakukan evaluasi-evaluasi terhadap sumber daya aparatur.

"Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Pontianak menjadi acuan Pemkot Pontianak untuk mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. (iza)